

The Effect Of Knowledge Of The Members Of The Regional People's Representative Board (DPRD), Community Participation, And Public Policy Transparency On The Regional Financial Supervision Of The City Of Bima

Pengaruh Pengetahuan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Partisipasi Masyarakat Dan Transparansi Kebijakan Publik Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah Kota Bima

Rohana^{1*}, Wahyunadi², Tita Rosita³

^{1,2,3}Universitas Terbuka Mataram

hana.bima2009@gmail.com

**Corresponding Author*

Abstrak

Tujuan penelitian untuk menganalisis pengaruh pengetahuan anggota dewan, partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan terhadap pengawasan keuangan daerah Kota Bima. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian sensus. yang mengambil satu kelompok populasi sebagai sampel secara keseluruhan dan menggunakan kuesioner yang terstruktur sebagai alat pengumpulan data yang pokok untuk mendapatkan informasi yang spesifik. Populasi dalam penelitian ini ialah seluruh anggota DPRD Kota Bima yang berjumlah sebanyak 25 orang. dimana respondennya adalah seluruh anggota DPRD Kota Bima. Penelitian ini bersifat asosiatif yaitu penelitian yang ingin menjelaskan pengaruh variabel X terhadap variabel Y, dianalisis menggunakan uji asumsi klasik. Data dianalisis dengan menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan anggota Dewan, partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pengawasan keuangan Daerah Kota Bima dengan $R^2 = 0,41$ pada $\alpha = 0,05$. Hasil penelitian kami sejalan dengan hasil penelitian terdahulu seperti Rida Perwita Sari, Syaiful Anwar (2009) mengemukakan bahwa pengetahuan Dewan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah dengan $\alpha = 0,05$. Simson Werimon Imam Ghazali, Mohamad Nazir (2007) menemukan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh negatif signifikan terhadap pengawasan keuangan dengan $\alpha = 0,05$. dan Isma Coryanata (2007), mengemukakan bahwa transparansi kebijakan publik mempengaruhi hubungan antara pengetahuan Dewan dengan pengawasan keuangan publik secara signifikan dengan $\alpha = 0,00$

Kata Kunci: Pengetahuan Dewan; Partisipasi Masyarakat; Transparansi Kebijakan Publik Pengawasan Keuangan

Abstract

The purpose of the study was to analyze the effect of the knowledge of the board members, public participation, and policy transparency on the financial supervision of the Bima City area. This research is a type of quantitative research that is associative namely research that wants to explain the effect of variable X on variable Y with as many as 25 respondents as members of the Bima City DPRD in 2019. The research method used is a questionnaire method with the instrument of this research is to use a questionnaire and analysis using assumption test classic. The number of samples is the entire population of 25 people. The data were analyzed using multiple linear regression analysis because there are The results showed that the knowledge of Council members, public participation, and policy transparency had a positive and significant influence on the financial supervision of the Bima City Region with $R^2 = 0.41$ at $\alpha = 0.05$. The results of our study are in line with the results of previous studies such as Rida Perwita. Sari, Syaiful Anwar (2009) stated that the knowledge of the Council has a positive and significant effect on regional financial supervision with $\alpha = 0.05$. Simson Werimon Imam Ghazali, Mohamad Nazir (2007) found that public participation had a significant negative effect on financial control with $\alpha = 0.05$. and Isma Coryanata (2007), stated that the transparency of public policies significantly affects the relationship between the knowledge of the Board and the supervision of public finances with $\alpha = 0.00$

Keywords: Board Knowledge; Community Participation; Transparency of Public Policy Financial Supervision

1. Pendahuluan

Implikasi positif dari berlakunya Undang-undang tentang Otonomi Daerah yang berkaitan dengan kedudukan, fungsi dan hak-hak DPRD, diharapkan DPRD yang selanjutnya disebut Dewan akan lebih aktif dalam menangkap aspirasi yang berkembang di masyarakat,

yang kemudian mengadopsinya dalam berbagai bentuk kebijakan publik di daerah bersama-sama Kepala Daerah.

DPRD sebagai Lembaga legislatif mempunyai tiga fungsi yaitu: 1) fungsi legislasi (fungsi membuat peraturan perundang-undangan), 2) fungsi anggaran (fungsi menyusun anggaran), 3) fungsi pengawasan (fungsi untuk mengawasi kinerja Eksekutif).

Menurut Sopanah: (2003), pengawasan anggaran yang dilakukan oleh Dewan dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal, Faktor internal adalah faktor yang dimiliki oleh Dewan, salah satunya adalah pengetahuan tentang anggaran, sedangkan faktor eksternal adalah partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik.

Penelitian yang dilakukan oleh Andriani (2002), menyimpulkan bahwa pengetahuan anggaran berpengaruh secara signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah yang dilakukan oleh Dewan, demikian pula Indradi (2001). Menemukan bahwa kualitas Dewan yang diukur dengan pendidikan, pengetahuan, pengalaman, dan keahlian berpengaruh terhadap kinerja Dewan.

Fenomena yang terjadi di DPRD Kota Bima menghadapi kendala dalam melaksanakan perannya sebagai fungsi pengawas bila dalam suatu masalah terlibat didalamnya dari anggota partai politik yang sama. Penyebabnya adalah pada awal karir mereka anggota Dewan dari berbagai partai politik sudah tertanam semboyan bahwa partai adalah rumah mereka, padahal seharusnya ketika mereka terpilih sebagai wakil rakyat maka atribut partai tidak lagi jadi patokan utama tetapi amanat rakyat yang seharusnya dikedepankan.

Disisi lain, lemahnya fungsi pengawasan legislatif merupakan faktor yang mempengaruhi kinerja legislatif terhadap eksekutif. Hal ini dapat terlihat bahwa selama ini ada Badan anggaran, yang seharusnya melakukan pengawasan dari mulai perencanaan sampai pada pelaporan tetapi dalam pelaksanaannya fungsi pengawasan belum berjalan dengan baik. Hal inilah yang menjadi pertimbangan peneliti untuk melakukan penelitian tentang pengaruh pengetahuan dewan, partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik terhadap pengawasan keuangan daerah Kota Bima.

2. Metode Penelitian

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif yang bersifat asosiatif yaitu penelitian yang ingin menjelaskan pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Dalam penelitian ini penulis ingin mengetahui atau mengukur pengaruh Pengetahuan Dewan, Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik terhadap Pengawasan Keuangan Daerah.

1. Jenis data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Dimana data diperoleh peneliti melalui penyebaran angket dan melakukan wawancara langsung dengan responden.

Responden penelitian adalah orang yang menjadi sasaran penelitian, dalam hal ini yang menjadi responden penelitian atau sumber informasi adalah keseluruhan anggota DPRD Kota Bima yang berjumlah 25 orang.

Instrumen Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan instrumen angket atau kuesioner dan pengukuran menggunakan skala Likert Positif. "Skala Likert digunakan untuk mengukur suatu sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang suatu fenomena sosial Sugiyono, (2014, hlm. 134), pemberian skor sebagai berikut:

Tabel 1. Instrumen Penelitian

1	SS	:	Sangat setuju	:	skor 5
2	S	:	Setuju	:	skor 4
3	TT	:	Tidak Tahu	:	skor 3
4	TS	:	Tidak setuju	:	skor 2
5	STS	:	Sangat Tidak Setuju	:	skor 1

Sebelum instrumen digunakan terlebih dahulu dilakukan uji reliabilitas yaitu suatu prosedur untuk mengukur suatu kuisioner yang merupakan indikator dari variable. Suatu kuisioner dikatakan realibel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. (Ghozali 2002).

Sedangkan suatu kuisioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuisioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuisioner dengan membandingkan nilai r hitung dengan r table untuk $df = n - 2$. (Ghozali 2005:5).

Prosedur Pengumpulan Data

Penelitian ini bersifat analisis deskriptif statistik, untuk memperoleh data serta informasi dilakukan pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat, dengan prosedur:

1. Mendatangi kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bima untuk menyebarkan angket pertanyaan;
2. Untuk memperkuat dan mendukung informasi dalam angket dilakukan wawancara dengan beberapa responden;
3. Pelaksanaan penyebaran angket dan wawancara untuk mengumpulkan data dilakukan dalam tiga tahap yaitu:
 - a. Tahap Persiapan meliputi persiapan angket sesuai dengan jumlah responden.
 - b. Tahap pelaksanaan, yaitu dengan menyebarkan angket kepada reponden.
 - c. Tahap pengambilan angket.

Metode Analisis Data

a. Analisis Deskpritif

Analisis deskriptif dilakukan untuk melakukan skala pengukuran variabel penelitian yang dijabarkan berdasarkan kelas interval, kategori dan ferekuensi dari masing-masing variabel penelitian. Skala pengukuran digunakan untuk mendeskripsikan sikap responden terhadap variabel penelitian. untuk mendeskripsikan variabel penelitian melalui hasil pembobotan terhadap masing-masing variabel dengan menggunakan lima skala sikap.

b. Regresi Berganda

Santoso dan Singgih (2013) menyebutkan bahwa sebelum melakukan analisis regresi berganda terlebih dahulu perlu dilakukan uji persyaratan analisis regresi yaitu uji asumsi klasik. Model regresi yang baik memenuhi unsur linieritas, normalitas, multikolinieritas, dan heteroskedatisitas dengan penjelasan dan kaidah sebagai berikut.

1) Uji Linieritas

Uji linieritas bertujuan untuk mengetahui apakah variabel independen dengan dependen mempunyai hubungan yang linear atau tidak secara signifikan. Uji ini digunakan sebagai prasyarat statistik parametrik khususnya dalam analisis korelasi atau regresi linear yang termasuk dalam hipotesis assosiatif.

Uji linieritas dengan *Test for Linearity*, variabel penelitian dikatakan mempunyai hubungan yang linear jika signifikansi (*deviation from linearity*) $\text{sig} > 0.05$ (Santoso dan Singgih 2013).

2) Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah sebuah data terdistribusi normal atau tidak dengan membandingkan taraf signifikan dari masing-masing variable 0.05. Untuk

mengetahui normalitasnya data masing-masing variabel dapat dilakukan dengan mengamati perbandingan nilai signifikan yaitu jika lebih besar dari > 0.05 maka dikatakan data berdistribusi normal. (Santoso dan Singgih, 2013).

3) Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas dilakukan untuk mengetahui apakah pada sebuah model regresi terdapat korelasi antar variabel bebas (independen). Jika, terjadi korelasi, maka dinamakan terdapat problem multikolinieritas (multiko). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. (Santoso dan Singgih, 2013). Variabel dikatakan tidak mengalami multikol jika nilai Pearson Correlation $< 0,8$ atau dengan melihat nilai Collinearity Statistics VIF < 10 .

Analisis Regresi Berganda

Analisis regresi digunakan untuk melakukan analisis hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Penelitian ini dilakukan analisis regresi berganda menggunakan program SPSS 16 *for windows*. Analisa ini menggunakan panduan Santoso dan Singgih (2013:93) dengan model persamaan regresi sebagai berikut.

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \epsilon \dots \dots \dots (1)$$

Keterangan:

Tabel 2. Koefisien Variabel Penelitian

Y :	Pengawasan Keuangan Daerah	α :	Konstanta
X₁ :	Pengetahuan Anggota DPRD	$\beta_1, \beta_2, \beta_3$:	Koefisien Regresi
X₂ :	Partisipasi Masyarakat	ϵ :	Error term
X₃ :	Transparansi Kebijakan		

Pengujian Hipotesis

Setelah melakukan analisis regresi, selanjutnya adalah menguji hipotesis penelitian; dengan kata lain apakah hipotesis yang telah diajukan oleh peneliti sebelumnya dapat diterima atau ditolak. Pengujian hipotesis penelitian ini menggunakan kaidah jika $\alpha < 0,05$ maka hipotesis alternative (H_a) diterima.

3. Hasil dan Pembahasan

Deskripsi Objek Penelitian

Jumlah responden anggota DPRD Kota Bima berjenis kelamin laki-laki sebanyak 23 orang (92,00%), dan 2 orang berjenis kelamin perempuan (8,00%).

Sedangkan berdasarkan usia, yang berusia 36-45 tahun dan 46-55 tahun berjumlah 9 orang (36,00%). usia 26-35 tahun sebanyak 6 orang (24,00%), dan usia 18-25 tahun 1 orang.

Hasil

Uji Validitas

Uji nilai r hitung dicari/didapat dengan menggunakan program SPSS, sedangkan nilai r tabel dicari dengan cara melihat tabel dengan ketentuan r (*variable*) minimal adalah 0,3 (Sugiono, 2011). Di bawah disajikan ringkasan *variable* deskriptif berupa gambaran kisaran teoritis, kisaran nyata, rata-rata dan standar deviasi yang terjadi.

Tabel di atas menunjukkan bahwa item *variable* penelitian pada *variable* pengetahuan dewan, partisipasi masyarakat, transparansi kebijakan dan pengawasan keuangan daerah semua memiliki nilai korelasi lebih besar atau sama dengan $\geq 0,3$ sehingga dinyatakan valid.

Uji Reliabilitas

Suatu konstruk dikatakan *realible* jika memberikan nilai *cronbach alpha* > 0.60 (Nunnally, 1967). di bawah disajikan ringkasan hasil uji reliabilitas *variable* yang digunakan dalam penelitian.

Tabel 3. Ringkasan Hasil Analisis Uji Normalitas

Variabel	Kolmogorov-Smirnov ^a		
	Statistic	df	Sig.
Pengetahuan Dewan	.086	25	.059
Partisipasi Masyarakat	.072	25	.058
Transparansi Kebijakan	.081	25	.076
Pengawasan Keuangan	.091	25	.068

Sumber : Data Primer, diolah

Berdasarkan hasil uji reabilitas di atas terlihat bahwa *cronbach alpha* untuk masing-masing variable > 0,60 artinya dapat dikatakan semua variable memenuhi kriteria realibel.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Data variable penelitian dikatakan berdistribusi normal, jika taraf signifikansinya < 0.05 Kolmogorov-Smirnova (Ghozali, 2013:160). Dengan demikian maka semua variable penelitian dinyatakan berdistribusi normal sebagaimana data yang ditampilkan dibawah ini.

Uji Multikolinieritas

Adapun hasil uji multikolinieritas dalam penelitian menggunakan bantuan SPSS 16 diketahui bahwa semua variabel penelitian tidak terjadi multikolinieritas.

Tabel 4. Ringkasan Hasil Analisis Multikolinieritas

Co					
		Y	X1	X2	X3
Pearson Correlation	Y	1.000	.650	.538	.519
	X1	.650	1.000	.683	.635
	X2	.523	.643	1.000	.668
	X3	.519	.635	.643	1.000
X1 = Pengetahuan Dewan X2 = Partisipasi Masyarakat X3 = Transparansi Kebijakan Y = Pengawasan Keuangan					

Pada tabel diatas menunjukkan hasil analisis interkorelasi antara variable bebas yang ditandai dengan nilai [koefisien korelasi pearson](#). Dalam hal ini di dalam Output [SPSS](#) dapat dilihat pada persilangan antar variable bebas. Hasil [korelasi](#) antara variable pengetahuan, partisipasi dan transparansi, dan pengawasan kurang dari atau lebih kecil dari 0,8 maka tidak terjadi multikolinearitas.

Uji Linieritas

Tabel 3. Ringkasan Hasil Analisis Linieritas

ANOVA Table		
Y * X1	Deviation from Linearity	.241
Y * X2	Deviation from Linearity	.206
Y * X3	Deviation from Linearity	.173

Hasil uji linieritas dengan menggunakan bantuan program SPSS diketahui semua variabel memiliki hubungan yang linieritas karena nilai sig *Deviation from Linearity* > 0.05. Adapun hasil analisis ditampilkan dalam tabel di bawah ini.

Analisis Deskriptif

Dalam analisis ini dihitung nilai harapan tertinggi dikurangi dengan nilai kemungkinan terendah kemudian dibagi dengan skor tertinggi dan hasilnya adalah jumlah rentang kelas (kelas interval). Adapun skor tertinggi adalah $100 - 20/5 = 16$. Jadi kelas interval dalam penelitian ini adalah 16,

Pengetahuan Dewan

Berdasarkan hasil penelitian data tentang pengetahuan DPRD Kota Bima menunjukkan bahwa pengetahuan dewan berada pada kategori cukup tinggi sebanyak 12%. Kategori tinggi sebanyak 56% dan terdapat 32% yang berada pada kategori sangat tinggi.

Partisipasi Masyarakat

Hasil penelitian tentang partisipasi masyarakat menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat berada pada kategori cukup tinggi sebanyak 32%. Kategori tinggi sebanyak 68%.

Transparansi Kebijakan

Pentingnya transparansi kebijakan dalam pengawasan keuangan daerah sangat diharapkan, karena menjadi kunci salah satu faktor yang menentukan terciptanya kontrol pengelolaan keuangan daerah. Dalam penelitian ditemukan bahwa transparansi kebijakan di DPRD Kota Bima berada pada kategori cukup tinggi sebanyak 24%. Kategori tinggi sebanyak 76%.

Pengawasan Keuangan Daerah

Hasil penelitian tentang Pengawasan Keuangan Daerah menunjukkan bahwa pengawasan keuangan daerah berada pada kategori cukup tinggi sebanyak 28%. Kategori tinggi sebanyak 68% dan 4% berada pada kategori sangat tinggi.

Analisis Regresi Berganda

Analisis regresi berganda dilakukan untuk mengetahui hubungan secara variabel antara variabel independen (pengetahuan dewan, partisipasi masyarakat dan transparansi) dengan variabel dependen (pengawasan keuangan daerah). Berikut ringkasan hasil analisis data penelitian.

Nilai prob. T hitung dari variabel bebas pengetahuan Anggota DPRD (X1) sebesar $0,043 < 0,05$ sehingga variabel Pengetahuan Anggota DPRD (X1) berpengaruh signifikan terhadap variabel Pengawasan Keuangan Daerah (Y) pada alpha 5% atau dengan kata lain, Pengetahuan Anggota DPRD (X1) berpengaruh signifikan terhadap Pengawasan Keuangan Daerah (Y) pada taraf keyakinan 95%.

Tabel 4. Coefficients^a

Model	Standar dized Coeffi cients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	Beta			Tole rance	VIF
1 (Constant)		17.3 8	.000		
X1	.402	2.33	.043	.223	4.49
X2	.548	2.59	.031	.223	4.49
X3	.472	2.13	.011	.223	4.49

Nilai prob. T hitung dari variable Partisipasi Masyarakat (X2) sebesar $0,031 < 0,05$ sehingga variable bebas Partisipasi Masyarakat (X2) berpengaruh signifikan terhadap variable Pengasawan Keuangan Daerah (Y) pada alpha 5% atau dengan kata lain, Partisipasi Masyarakat (X2) berpengaruh signifikan terhadap Pengasawan Keuangan Daerah (Y) pada taraf keyakinan 95%.

Nilai prob. T hitung dari variable Transparansi Kebijakan (X3) sebesar $0,011 < 0,05$ sehingga variable bebas Transparansi Kebijakan (X3) berpengaruh signifikan terhadap variable Pengasawan Keuangan Daerah (Y) pada alpha 5% atau dengan kata lain, Transparansi Kebijakan (X3) berpengaruh signifikan terhadap Pengasawan Keuangan Daerah (Y) pada taraf keyakinan 95%.

Persamaan regresi: $Y = 17.384 + 0,402 X_1 + 0,548 X_2 + 0,472 X_3$

Berdasarkan hasil persamaan estimasi model di atas tanda koefisien regresi dari variable bebas menunjukkan tanda positif semua. Koefisien variable Pengetahuan Anggota DPRD (X1) sebesar **0,402** dengan tanda positif menandakan adanya pengaruh yang positif dari Pengetahuan Anggota DPRD (X1) terhadap Pengasawan Keuangan Daerah (Y), apabila Pengetahuan Anggota DPRD (X1) meningkat maka Pengasawan Keuangan Daerah (Y) oleh anggota Dewan akan meningkat secara positif.

Koefisien regresi variable bebas Partisipasi Masyarakat (X2) bertanda positif sebesar **0,548**. Menandakan adanya pengaruh yang positif dan signifikan dari Partisipasi Masyarakat (X2) terhadap Pengasawan Keuangan Daerah (Y), jika terjadi peningkatan Partisipasi Masyarakat (X2), maka akan semakin meningkatkan implemtasi pengasawan terhadap Keuangan Daerah (Y), meskipun variabel Partisipasi Masyarakat (X2) bukan merupakan variabel moderating yang dapat mempengaruhi hubungan pengetahuan Dewan dengan pengawasan keuangan daerah.

Hasil estimasi variable Transparansi Kebijakan (X3) tanda koefisien regresi positif sebesar **0,472**. Artinya menandakan adanya pengaruh yang positif dan signifikan dari Transparansi Kebijakan (X3) terhadap Pengasawan Keuangan Daerah (Y), apabila terdapat Transparansi Kebijakan (X3) dan publik dapat mengakses setiap informasi terkait implementasi kebijakan, maka akan mendorong terjadinya Pengasawan terhadap Keuangan Daerah (Y).

Uji Koefisien determinasi (R square)

Tabel 5. Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Durbin-Watson
1	.641 ^a	.410	.618	1.764

a. Predictors: (Constant), X1, X2, X3

b. Dependent Variable: Y

Uji kesesuaian (goodness of fit) dari model regresi dapat dilihat dari nilai R Square. Pada penelitian ini ingin mengetahui Pengasawan Keuangan Daerah (Y) yang dipengaruhi oleh variabel independen antara lain Pengetahuan Anggota DPRD (X1), Partisipasi Masyarakat (X2), Transparansi Kebijakan (X3) dapat dilihat melalui besarnya koefisien determinasi R^2 .

Nilai R-Square dalam penelitian ini sebesar 0,410 menunjukkan bahwa proporsi pengaruh variabel Pengetahuan Anggota DPRD (X1), Partisipasi Masyarakat (X2), Transparansi Kebijakan (X3) terhadap variabel dependen Pengasawan Keuangan Daerah (Y) sebesar 41,0%. artinya, ketiga variabel independen dalam model persamaan tersebut mampu menjelaskan pengaruhnya sebesar 41,00% terhadap variabel **dependennya**, sedangkan 59,00% dipengaruhi oleh variabel lain diluar model.

Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis dimaksudkan untuk mengetahui apakah hipotesis yang telah diajukan sebelumnya oleh penelitian dapat diterima atau tidak. Sebagaimana telah disebutkan pula mengenai kaidah pengambilan keputusan, yaitu:

a. Uji-t (Parisial) :

Uji t dalam regresi linier berganda dimaksudkan untuk menguji apakah parameter (koefisien regresi dan konstanta) yang diduga untuk mengestimasi persamaan/model regresi linier berganda apakah mampu menjelaskan perilaku variabel bebas dalam mempengaruhi variabel terikatnya.

Parameter yang diestimasi dalam regresi linier meliputi intersep (konstanta) dan slope (koefisien dalam persamaan linier). Pada bagian ini, uji t difokuskan pada parameter slope (koefisien regresi) saja. Jadi uji t yang dimaksud adalah uji koefisien regresi.

Apabila nilai prob. t hitung $< 0,05$ maka dapat dikatakan bahwa variabel bebas berpengaruh signifikan terhadap variabel terikatnya.

Apabila nilai prob. t hitung $> 0,05$ maka dapat dikatakan bahwa variabel bebas tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel terikatnya, atau jika taraf sig $< 0,05$ maka hipotesis alternatif (H_a) dapat diterima, artinya hipotesis nihil (H_0) ditolak, demikian juga sebaliknya.

Dari hasil regresi pada tabel 4 Coefficientsa diatas menunjukan taraf signifikansi Pengetahuan Anggota DPRD (X1) sebesar $0,043 < 0,05$, dengan demikian maka H_0 ditolak atau menerima H_a yang berarti bahwa Pengetahuan Anggota DPRD (X1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pengasawan Keuangan Daerah (Y). Hal ini sejalan dengan hipotesis dari penelitian ini yang menyatakan bahwa Pengetahuan Anggota DPRD (X1) berpengaruh signifikan terhadap Pengasawan Keuangan Daerah (Y) Kota Bima.

Taraf signifikansi Partisipasi Masyarakat (X2) sebesar $0,034 < 0,05$, dengan demikian maka H_0 ditolak atau menerima H_a yang berarti bahwa Partisipasi Masyarakat (X2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pengasawan Keuangan Daerah (Y). Hal ini sejalan dengan hipotesis dari penelitian ini yang menyatakan bahwa Partisipasi Masyarakat (X2) berpengaruh signifikan terhadap Pengasawan Keuangan Daerah (Y) Kota Bima.

Taraf signifikansi Transparansi Kebijakan (X3) sebesar $0,012 < 0,05$, dengan demikian maka H_0 ditolak atau menerima H_a yang berarti bahwa Transparansi Kebijakan (X3)

berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pengawasan Keuangan Daerah (Y). Hal ini sejalan dengan hipotesis dari penelitian ini yang menyatakan bahwa Transparansi Kebijakan (X3) berpengaruh signifikan terhadap Pengawasan Keuangan Daerah (Y) Kota Bima.

b. Uji-F (Simultan) :

Nama uji ini disebut sebagai uji F, karena mengikuti distribusi F yang kriteria pengujiannya seperti One Way Anova. Nilai prob. F hitung (sig.) pada output regresi harus < tingkat signifikansi 0,05 untuk dapat disimpulkan bahwa model regresi linier yang diestimasi layak digunakan.

Tabel 6
ANOVA

Model	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	2	2.158E25	51.268	.000 ^a
Residual	7	4.209E23		
Total	9			

Nilai prob. F hitung (sig.) pada output di atas sebesar 0,000 < tingkat signifikansi 0,05 dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model regresi linier yang diestimasi layak digunakan untuk menjelaskan pengaruh variabel independen Pengetahuan Anggota DPRD (X1), Partisipasi Masyarakat (X2), dan Transparansi Kebijakan (X3) berpengaruh secara simultan terhadap variabel dependen yaitu Pengawasan Keuangan Daerah (Y) Kota Bima.

Pengaruh Parsial Pengetahuan anggota Dewan Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah

Pengujian hipotesis dengan analisis regresi linier berganda untuk pengaruh pengetahuan Dewan terhadap pengawasan keuangan daerah bahwa pengetahuan Dewan berpengaruh signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah. Hasil penelitian ini relevan dengan penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Sopanah dan Mardiasmo (2013) dan Rosseptalia (2016) bahwa pengetahuan Dewan tentang anggaran berpengaruh signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD).

Ini menunjukkan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bima memiliki pengetahuan yang mendasar tentang pelaksanaan fungsi pengawasannya yaitu Pengawasan keuangan daerah oleh DPRD tahap perencanaan, tidak hanya pada tahap pelaksanaan dan pelaporan saja sebagaimana yang terjadi selama ini. Hal ini penting karena dalam era otonomi, DPRD memiliki wewenang untuk menentukan arah dan kebijakan APBD.

Pengaruh Parsial Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah

Syaiful (2009) menegaskan, bahwa partisipasi masyarakat kunci sukses dalam pelaksanaan otonomi daerah karena dalam partisipasi yaitu menyangkut tentang aspek pengawasan dan aspirasi. Salah satu upaya yang bisa dilakukan adalah mengoptimalkan peran dari lembaga institusi lokal non pemerintahan seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), media masa, organisasi kemasyarakatan dan partai politik.

Berkaitan dengan itu hasil penelitian diketahui partisipasi masyarakat berpengaruh signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah. Hal ini penelitian yang dilakukan oleh Saputro (2012) bahwa partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik terhadap pengawasan berpengaruh signifikan yang positif. Partisipasi masyarakat dalam penganggaran

harus dilakukan pada setiap tahapan dalam siklus anggaran mulai dari penyusunan, ratifikasi, pelaksanaan, sampai dengan pertanggungjawaban dalam penelitian Mardiasmo (2012).

Pengaruh Parsial Transparansi Kebijakan Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah

Transparansi merupakan salah satu prinsip dari good governance. Transparansi juga bisa berarti informasi yang cukup berkaitan dengan kinerja lembaga tersedia dan disajikan dalam bentuk atau media yang mudah dipahami masyarakat (Amin, 2008). Transparansi Kebijakan Publik adalah keterbukaan tentang anggaran yang mudah diakses oleh masyarakat. Kebijakan publik merupakan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dan sebagai keputusan yang mempunyai tujuan tertentu (Pangesti, 2013).

Hasil pengujian hipotesis penelitian diketahui bahwa transparansi kebijakan memiliki pengaruh parsial yang signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah. Hasil penelitian mendukung hasil dari penelitian Sopanah dan Wahyudi (2013) menyatakan bahwa transparansi kebijakan publik berpengaruh signifikan terhadap hubungan antara pengetahuan anggaran dengan pengawasan keuangan daerah. Penelitian yang dilakukan oleh Saputro (2012) menyatakan bahwa partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik terhadap pengawasan berpengaruh signifikan yang positif.

Pengaruh Parsial Pengetahuan Dewan, Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah

Pengetahuan anggota dewan menjadi tolak ukur kehebatan wakil rakyat karena dalam menjalankan tugasnya dibutuhkan pengetahuan yang luas dan mendalam terutama mengenai pengawasan keuangan daerah. Namun harus didukung oleh ketelibatan masyarakat sebab masyarakat adalah bagian yang tidak bisa dipisahkan dengan eksekutif dan legislatif. Oleh karena itu partisipasi masyarakat memiliki pengaruh signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Arianti (2017) bahwa pengetahuan tentang anggaran, partisipasi masyarakat, dan transparansi kebijakan publik secara simultan berpengaruh terhadap pengawasan keuangan daerah.

Menurut Krina (2012), prinsip utama yang melandasi *good governance*, yaitu (1) Akuntabilitas, (2) Transparansi (3) Partisipasi Masyarakat

4. Penutup

Berdasarkan hasil pembahasan diatas maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Variabel pengetahuan anggota Dewan (X1), partisipasi masyarakat (X2), dan transparansi kebijakan (X3) secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah,, dengan hasil estimasi nilai $R^2 = 0.41$, artinya, ketiga variabel independen dalam model persamaan tersebut mampu menjelaskan pengaruhnya sebesar 41,00% terhadap variabel **dependennya**, sedangkan 59,00% dipengaruhi oleh variabel lain diluar model.
2. Pengetahuan anggota Dewan (X1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah (Y). semakin tinggi wawasan dan pengetahuan tentang anggaran dari anggota dewan maka semakin tinggi terkait penyusunan arah dan kebijakan, penentuan strategi dan prioritas serta advokasi anggaran;
3. Partisipasi masyarakat (X2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah (Y). semakin tinggi tingkat partisipasi masyarakat maka semakin tinggi pula kontrol dan pengawasan terhadap keuangan daerah, baik saat perencanaan maupun penggunaannya;
4. Transparansi kebijakan publik (X3) berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah (Y). implementasi kebijakan publik yang transparan (X3) akan memudahkan kontrol dan pengawasan terhadap Keuangan Daerah (Y).

5. Variabel yang dominan mempengaruhi pengawasan keuangan daerah adalah variabel implementasi kebijakan publik yang transparan (X3) .

Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat dikemukakan beberapa saran:

1. Untuk meningkatkan wawasan dan pengetahuan tentang anggaran bagi anggota Dewan, maka sebelum dilakukan proses pembahasan anggaran diperlukan penguatan kapasitas bagi anggota Dewan berupa pelatihan atau kegiatan serupa lainnya agar seluruh anggota dewan lebih memahami dan mengetahui dengan baik tentang proses penganggaran dan pengawasan keuangan daerah;
2. Partisipasi masyarakat dalam Musrembang, Hearing Dewan, pembahasan anggaran harus ditingkatkan agar kontrol dan pengawasan masyarakat terhadap kebutuhan masyarakat yang telah diajukan untuk memperoleh dukungan keuangan daerah semakin tinggi;
3. Setiap kebijakan publik yang dihasilkan oleh eksekutif maupun legislatif terkait rencana penggunaan keuangan daerah sebaiknya disosialisasikan dan dipublikasikan melalui website pemerintah daerah agar publik dapat mengetahui dan mengakses informasi kebijakan tersebut.

Daftar Pustaka

- (1999), Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah
- (1999), Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah
- (2004), Undang Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintah Daerah
- (2004), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2004, tentang Keuangan Negara
- (2005), *Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*
- (2005), *Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*
- (2014), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Amin, Widjaja Tunggal. (2008). *Dasar-dasar Customer Relationship Management (CRM)*. Jakarta: Harvindo.
- ANDI Nasirwan. (2008). *Pengaruh Pengetahuan Anggota Dewan Tentang Anggaran Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah Dengan Partisipasi Masyarakat* .
- Arianti, E. (2017). *Pengaruh Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah (APBD) Dengan Political Background, Akuntabilitas Publik Dan Transparansi Kebijakan Publik Sebagai Variabel Pemoderasi (Studi Empiris Pada DPRD Kabupaten Pelalawan)*. JOM Fekon, Vol. 4 No. 1 (Februari) 2017.
- Corynata, Isma. (2007). *Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat, dan Transparansi Kebijakan Publik Sebagai Pemoderating hubungan Pengetahuan Dewan tentang Anggaran dan Pengawasan Keuangan Daerah (APBD)*. Simposium Nasional Akuntansi X Universitas Hassanudin.
- Devi, Nirmala. (2010). *Sektor Publik Pemerintah*. Media Akuntansi. Edisi 26. BPK RI Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Atas Laporan Keuangan Pemerintah.
- Isma Corynata, (2007). *Jurnal Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat dan Transparansi kebijakan publik sebagai pemoderating hubungan pengetahuan Dewan tentang anggaran dan pengawasan keuangan daerah*.

- Jafar Werfete, (2009). *Tesis Pengaruh kualitas SDM anggota dewan, Komitmen profesional, dan control masyarakat terhadap pengawasan keuangan daerah Kabupaten Kaimana*.
- Jaka Winarna dan Sri Murni, (2007). *Jurnal Pengaruh Personal Background, Political Background, Pengetahuan Dewan tentang Anggaran terhadap Peran DPRD dalam Pengawasan Keuangan Daerah*.
- Krina P., Loina, Lalolo, (2012), *Indikator & Alat Ukur Prinsip kuntabilitas, Transparansi & Partisipasi*. Jakarta: Sekretariat Good Public Governance Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Mardiasmo. (2012). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta:
- Pangesti, Isa. (2013). *Analisis pengetahuan dewan tentang pengawasan keuangan daerah (APBD) dengan menggunakan variabel moderating*. Accounting Analysis Journal AA 1(3) 2013.
- Rida Perwita Sari, Syaiful Anwar, (2009). *Jurnal akuntabilitas, partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik sebagai pemoderating hubungan dewan tentang anggaran dan pengawasan keuangan daerah*.
- Roseptalia, Rima. (2016). *Pengaruh Pengetahuan Dewan tentang Anggaran terhadap Pengawasan Keuangan Daerah dengan Variabel Moderator Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik*. Tesis UII: Yogyakarta.
- Saputro, Aditya Dibyo. (2013). *Pengaruh Partisipasi Masyarakat Dan Transparansi Kebijakan Publik Terhadap Hubungan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Dengan Pengawasan Keuangan Daerah (Studi Empiris Di DPRD Kabupaten Boyolali)*. Tesis Universitas Muhammadiyah Surakarta
- Sarwono, Jonathan. (2006). *Metode Penelitian kuantitatif dan kualitatif*. Jogjakarta: Graha ilmu.
- Simson Werimon Imam Ghozali, Mohamad Nazir, (2007). *Jurnal Pengaruh partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik terhadap hubungan antara pengetahuan Dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah*.
- Sopannah, (2003). *Jurnal Pengaruh Partisipasi Masyarakat dan transparansi kebijakan publik terhadap pengawasan anggaran*
- Sopannah. (2013). *Pengaruh Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik Terhadap Hubungan antara Pengetahuan Dewan tentang Anggaran dengan Pengawasan Keuangan Daerah, dalam Proceiding Simposium Nasional akuntansi VI, Membangun Citra Akuntan melalui Peningkatan Kualitas Pengetahuan, Pendidikan dan Etika Bisnis*, Surabaya, 16-1760
- Syaiful. (2009). *Manajemen Strategi dalam Peningkatan Mutu Pendidikan dan akuntansi*. Bandung: Alfabeta.
- Werimon, Ghozali dkk. (2014). *Pengaruh Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik terhadap Hubungan antara Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran dengan Pengawasan Keuangan Daerah (APBD) Studi empiris di Provinsi Papua*. Tesis Studi Empiris di Kota Semarang.